

Apakah religiositas keislaman memengaruhi ketimpangan pendapatan? Bukti data panel dari Provinsi Aceh

Khairul Amri¹, A. Rahmat Adi²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, khairul.amri@ar-raniry.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, rahmat.adi@ar-raniry.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh religiositas keislaman terhadap distribusi pendapatan. Religiositas diukur melalui proksi tiga indikator, yaitu jumlah masjid, pesantren, dan santri. Menggunakan dataset panel 23 kabupaten/kota di Aceh dari tahun 2010 hingga 2017, model analisis data yang digunakan adalah regresi panel metode *fixed-effect*. Hasil penelitian menemukan bahwa pesantren dan santri berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, keberadaan masjid tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Hasil uji kausalitas Granger memberikan informasi statistik kausalitas satu arah dari ketimpangan pendapatan ke masjid dan pesantren dan dari masjid dan santri ke pesantren. Namun, tidak ada kausalitas dari ketiga dimensi religiositas keislaman terhadap ketimpangan pendapatan. Informasi statistik ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, perubahan religiositas Islam di Aceh merupakan respons terhadap perubahan ketimpangan pendapatan. Di sisi lain, ketimpangan pendapatan tidak merespons perubahan religiositas keislaman.

Kata kunci: Religiositas keislaman, ketimpangan pendapatan, regresi panel, *Granger causality test*

Klasifikasi JEL: O15, B23, Z12

Abstract

This study analyzes the effect of Islamic religiosity on income distribution. The religiosity was proxied by three measurement indicators comprising the number of mosques, pesantren, and santri. Using a panel dataset of 23 districts in Aceh from 2010 to 2017, the data analysis model used was panel regression with the fixed-effect method. The study found that the pesantren and santri had a positive effect the income inequality. In contrast, the existence of mosques did not affect income inequality. The results of the Granger causality test provide statistical information on the one-way causality from income inequality to mosques and pesantren and from mosques and santri to pesantren. But, there is no causality from the three dimensions of Islamic religiosity to income inequality. This statistical information suggests that, in the short run, the change in Islamic religiosity in Aceh is a response to changes in income inequality. On the other hand, income inequality does not respond to Islamic religiosity changes.

Keywords : Islamic religiosity, Income Inequality, Panel Regression, Granger causality test

JEL Classification: O15, B23, Z12

PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan menjadi persoalan ekonomi yang dihadapi oleh hampir seluruh negara (Cerniauskas & Ciginas, 2020). Bahkan dalam kasus banyak negara, ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan pada berbagai level pembangunan (Wells, 2006). Ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah rasio Gini (Gastwirth, 2017). Rasio ini pada dasarnya merupakan rasio persentase akumulasi pendapatan yang diterima sekelompok penduduk dalam suatu perekonomian terhadap persentase

jumlah penduduk. Peningkatan rasio Gini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata (ketimpangan semakin tinggi). Sebaliknya, penurunan rasio Gini berarti distribusi pendapatan semakin merata (ketimpangan semakin rendah) (Park dkk., 2017).

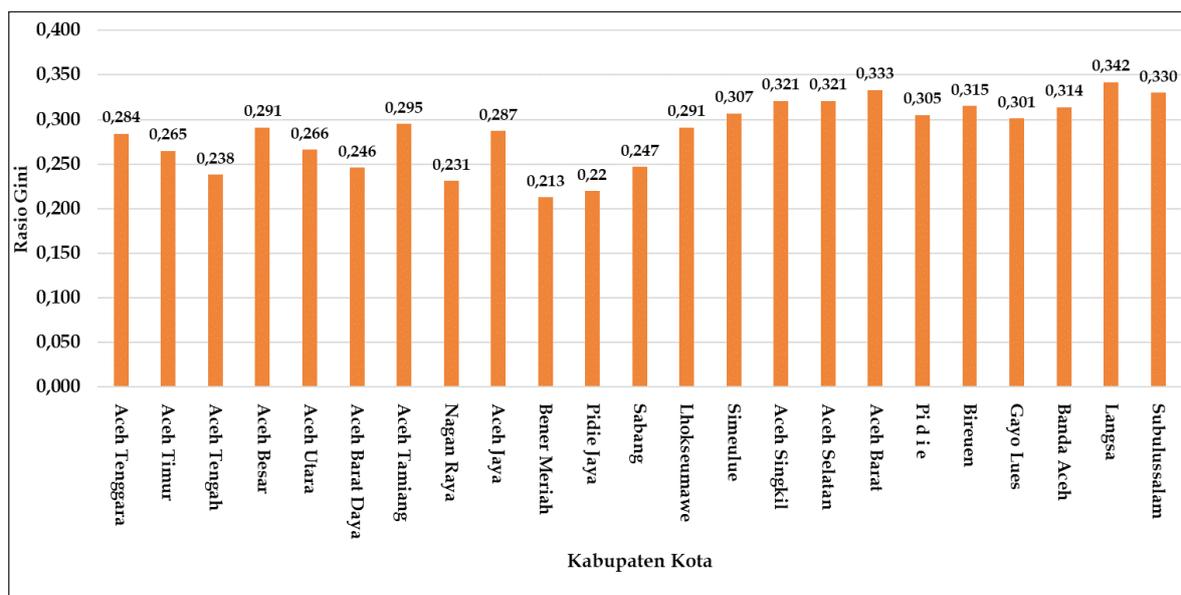
Seiring dengan proses pembangunan ekonomi daerah, tingkat ketimpangan pendapatan di masing-masing daerah di Provinsi Aceh juga berbeda. Perbedaan ini diindikasikan dengan adanya perbedaan rasio Gini antar kabupaten/kota. Pada tahun 2017, daerah dengan ketimpangan

paling tinggi adalah kota Langsa dengan rasio Gini sebesar 0,342. Kemudian menyusul Aceh Barat dan kota Subulussalam dengan rasio Gini masing-masing sebesar 0,333 dan 0,330. Di urutan berikutnya terdapat Aceh Singkil dan Aceh Selatan masing-masing sebesar 0,321, Bireuen sebesar 0,315 dan Kota Banda Aceh dengan rasio Gini sebesar 0,314. Dalam tahun yang sama, daerah dengan ketimpangan paling rendah adalah kabupaten Bener Meriah dengan rasio Gini sebesar 0,213. Kemudian menyusul Kabupaten Pidie Jaya, Nagan Raya dan kabupaten Aceh Tengah dengan rasio Gini masing-masing sebesar 0,220; 0,231 dan 0,238 (BPS Aceh, 2019). Deskripsi rasio Gini masing-masing kabupaten/kota di Aceh seperti ditunjukkan dalam Gambar 1.

Adanya perbedaan ketimpangan pendapatan masing-masing kabupaten/kota di Aceh dapat dikaitkan dengan banyak faktor di antaranya faktor ekonomi maupun non ekonomi. Hal ini disebabkan perilaku dan kemampuan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi terkait secara langsung dengan kedua faktor tersebut. Faktor ekonomi seperti ketersediaan modal dan tenaga kerja misalnya secara langsung merupakan faktor penentu kemampuan produksi. Sedangkan faktor non ekonomi seperti lingkungan sosial budaya, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta faktor non ekonomi lainnya termasuk peraturan pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan

ekonomi masyarakat juga berdampak terhadap perkembangan usaha masyarakat. Dalam kajian ini, faktor non ekonomi yang dimaksudkan dibatasi pada faktor keagamaan (religiositas). Religiositas didefinisikan sebagai kepatuhan seseorang yang menganut agama tertentu terhadap nilai-nilai keagamaan, keyakinan, dan ritual yang dilakukannya sesuai dengan aturan agama tersebut. Religiositas yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah religiositas keislaman yakni komitmen atau ketetapan hati seseorang muslim dalam bertindak dan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam (Makros & McCabe, 2003; Aji, 2018).

Kajian tentang keterkaitan antara ketimpangan pendapatan dengan religiositas keislaman sangat menarik dalam konteks daerah Aceh. Apalagi Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang 95% lebih penduduknya beragama Islam. Pengukuran religiositas keislaman dalam kajian ini didekati dengan pengukuran kuantitatif dengan menggunakan tiga dimensi yakni jumlah masjid dan institusi keagamaan, termasuk lembaga pendidikan non-formal seperti pesantren/dayah dan jumlah santri. Penggunaan institusi keagamaan sebagai indikator pengukuran religiositas suatu daerah merujuk pada pendapat Wang dan Lin (2014) yang menyatakan bahwa tingkat religiositas suatu daerah dapat menggunakan proksi jumlah institusi keagamaan di daerah tersebut.



Sumber: BPS Aceh (2019)

Gambar 1. Rasio Gini menurut kabupaten/kota di Aceh Selama Periode Tahun 2017

Hasil kajian awal yang dilakukan melalui dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan tiga dimensi religiositas keislaman tersebut mengindikasikan bahwa tingkat religiositas masyarakat di Aceh relatif berbeda antar daerah. Perbedaan ini diindikasikan dengan jumlah masjid, pesantren dan jumlah santri di masing-masing daerah. Berdasarkan dimensi masjid, hingga tahun 2017 daerah dengan jumlah masjid paling banyak adalah Aceh Tengah yakni sebanyak 21 unit per 10.000 jiwa penduduk. Kemudian menyusul Simeulue dan Aceh Barat dengan jumlah masjid masing-masing sebanyak 20 dan 18 unit per 10.000 jiwa penduduk. Dalam tahun yang sama, daerah dengan masjid paling sedikit adalah kota Lhokseumawe dan Langsa masing-masing 3 dan 4 unit per 10.000 jiwa penduduk, kemudian menyusul Bireuen, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Besar dengan jumlah masjid masing-masing 5 unit per 10.000 jiwa penduduk (BPS Aceh, 2018).

Seiring dengan adanya perbedaan jumlah masjid, eksistensi lembaga pendidikan Islam yang dalam hal ini adalah pesantren juga relatif berbeda berdasarkan daerah. Dalam konteks Aceh, pesantren disebut dengan *dayah* yang menurut klasifikasinya terdiri dari *dayah terpadu* (pesantren modern) dan *dayah salafiyah* (pesantren tradisional) (Qanun Aceh No. 9 Tahun 2018). Sebagian besar pesantren di daerah ini masuk kategori pesantren tradisional yakni sebesar 77,7%. Dengan demikian, pesantren modern hanya 22,3% (BPS Aceh, 2018). Dalam kajian ini, pesantren yang dimaksudkan adalah total pesantren secara keseluruhan tanpa melihat kategorisasi tersebut. Hingga tahun 2017, daerah dengan jumlah pesantren paling banyak adalah Pidie dan Aceh Barat masing-masing sebanyak 13 unit dan 10 unit per 20.000 jiwa penduduk. Kemudian menyusul Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Utara dan kota Banda Aceh diurutan ketiga dengan jumlah pesantren masing-masing 9 unit per 20.000 jiwa penduduk. Sebaliknya, daerah dengan pesantren paling sedikit adalah Aceh Singkil, hanya 1 unit pesantren per 20.000 jiwa penduduk. Di urutan berikutnya terdapat Langsa, Simeulue dan Aceh Tengah. Jumlah pesantren di tiga daerah tersebut masing-masing sebanyak 2 unit per 20.000 jiwa penduduk (BPS Aceh, 2018).

Selanjutnya, berdasarkan dimensi jumlah santri sebagai ukuran religiositas keislaman,

diperoleh ukuran kuantitatif bahwa tingkat religiositas masing-masing daerah juga relatif berbeda. Santri yang dimaksudkan dalam hal ini adalah jumlah santri per 10.000 jiwa penduduk. Hingga tahun 2017, daerah dengan jumlah santri paling besar adalah Aceh Besar dengan santri sebanyak 629 orang per 10.000 jiwa penduduk. Kemudian menyusul Pidie Jaya dan Bireuen di urutan kedua dan ketiga dengan santri sebanyak 607 orang dan 603 orang per 10.000 jiwa penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan Islam di tiga daerah tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Aceh. Dalam periode tahun yang sama, daerah dengan jumlah santri paling sedikit adalah Banda Aceh yakni sebanyak 25 orang per 10.000 jiwa penduduk. Kemudian menyusul Simeulue dan Aceh Tengah masing-masing 38 orang dan 82 orang santri per 10.000 jiwa penduduk (BPS Aceh, 2018). Data kuantitatif ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat di tiga daerah tersebut untuk mendalami ajaran keislaman melalui pesantren relatif lebih rendah dibandingkan daerah lainnya.

Adanya perbedaan jumlah masjid, pesantren dan santri berdasarkan daerah di Aceh seperti dijelaskan di atas, merupakan sinyalemen kuantitatif untuk menafsirkan adanya perbedaan religiositas keislaman antar daerah kabupaten/kota di Aceh. Perbedaan tersebut tentunya dapat berdampak pada kegiatan ekonomi yang pada gilirannya mempengaruhi ketimpangan pendapatan di masyarakat. Sebab, religiositas keagamaan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi karena kepercayaan pada agama mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka termasuk dalam kegiatan ekonomi (Wang & Lin, 2014). Agama berkaitan dengan cara hidup, dan penganut agama mempraktikkan nilai dan norma agama dalam berbagai aspek kehidupan mereka, sehingga sikap dan perilaku ekonomi mereka sangat dipengaruhi oleh religiositas keagamaan (Van Buren dkk., 2019).

Pada gilirannya, sikap dan perilaku ekonomi tidak hanya berdampak pada pranata sosial tetapi juga mempengaruhi pembangunan ekonomi (Minarik, 2019). Kepatuhan masyarakat dalam menjalankan ibadah sholat berjamaah dan kesadaran mereka tentang pentingnya peningkatan

ilmu pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan ajaran Islam, tentunya dapat berdampak pada perilaku mereka dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, termasuk dalam hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Meskipun demikian, ketaatan dalam beribadah dan pemahaman tinggi tentang ajaran Islam yang kemudian melahirkan perilaku Islami dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi misalnya, belum tentu memadai bagi upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi tanpa diimbangi dengan peningkatan pengetahuan umum dan keterampilan kerja yang lebih baik. Peningkatan jumlah *dayah salafiyah* (pesantren tradisional) yang kurikulumnya fokus pada kajian kitab kuning seperti dikemukakan sebelumnya, akan berdampak pada ketimpangan keterampilan dan kesempatan kerja di masyarakat, yang pada akhirnya berpotensi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan.

Hingga saat ini, hasil kajian empiris mengenai keterkaitan antara religiositas dan ketimpangan pendapatan juga masih menunjukkan hasil berbeda. Hubungan antara kedua variabel tersebut masih sulit untuk dipahami (Keister & Eagle, 2016). Sebelumnya Elgin dkk. (2013) dalam penelitian mereka menyimpulkan adanya hubungan positif antara tingkat religiositas dengan ketimpangan pendapatan. Daerah dengan tingkat religiositas tinggi ketimpangan pendapatan juga tinggi. Sebaliknya daerah dengan religiositas rendah memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah. Temuan lainnya mengenai keterkaitan antara kedua variabel tersebut seperti dikemukakan oleh Matteo (2015) yang menemukan bahwa hubungan antara ketimpangan ekonomi dan religiositas relatif lemah.

Adanya perbedaan temuan empiris mengenai keterkaitan antara religiositas dan ketimpangan pendapatan seperti dijelaskan di atas merupakan kesenjangan empiris (*empirical gap*) yang secara akademis perlu diteliti lebih lanjut. Apalagi dalam konteks Aceh yang secara umum penduduknya beragama Islam. Adanya perbedaan ketimpangan pendapatan di masing-masing kabupaten/kota, mendorong pentingnya mengaitkan variabel ekonomi ini dengan tingkat religiositas keislaman (*Islamic religiosity*) masyarakatnya. Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini menggunakan data panel 23 kabupaten/kota di Aceh. Metode regresi

panel pendekatan *fixed-effect* diaplikasikan untuk mengestimasi koefisien dimensi religiositas keislaman terhadap ketimpangan pendapatan. Guna mendapatkan informasi empiris yang lebih detail, model ekonometri tersebut juga dilengkapi dengan *Granger causality test* sehingga temuan penelitian tidak hanya menyajikan informasi tentang arah dan signifikansi pengaruh dimensi religiositas terhadap ketimpangan pendapatan, tetapi juga memberikan informasi statistik mengenai arah kausalitas antar variabel, apakah religiositas keislaman mendorong perubahan ketimpangan pendapatan, atau sebaliknya, ketimpangan pendapatan mendorong perubahan dalam religiositas keislaman.

TINJAUAN PUSTAKA

Religiositas keislaman

Religiositas dapat didefinisikan sebagai tingkat kepatuhan seseorang terhadap nilai-nilai religius, keyakinan serta ritual yang dilakukan dalam kaitannya dengan agama yang dianutnya. Religiositas keislaman adalah komitmen seseorang muslim untuk melaksanakan ajaran Islam yang direfleksikan dalam bentuk keyakinan dan perbuatan (Aji, 2018). Religiositas keislaman seseorang muslim dapat diukur melalui dua pendekatan yakni keyakinan (*Islamic beliefs*) dan praktik perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam (Makros & McCabe, 2003). Dari segi praktik perilaku, indikator yang digunakan untuk mengukur religiositas tersebut antara lain shalat lima waktu, pergi ke masjid, membaca Al-Qur'an, puasa di bulan Ramadhan, naik haji, membayarkan zakat dan merayakan idul fitri dan idul adha (Jana-Masri & Priester, 2007). Abu Raiya dkk. (2008) dalam penelitian mereka mengungkapkan bahwa religiositas keislaman berdasarkan praktik perilaku dapat diukur berdasarkan tingkat keseringan seseorang muslim datang ke masjid, kepatuhan dalam melaksanakan ibadah shalat, puasa, dan membaca Al-Qur'an. Penelitian Lam dan Mansouri (2020) tentang religiositas pemuda muslim di Australia juga menggunakan indikator-indikator tersebut dalam mengukur religiositas keislaman. Sebelumnya, Musa (2015) menyatakan bahwa perilaku religius seseorang muslim dapat diukur berdasarkan

kepatuhannya dalam menjalankan ibadah shalat, pergi ke masjid, membaca Al-Qur'an dan melaksanakan zikir.

Pengukuran religiositas keislaman yang dilakukan oleh sejumlah peneliti di atas menggunakan pendekatan perilaku dalam konteks individual. Seperti kepatuhan melaksanakan ibadah shalat dan datang ke masjid misalnya, religiositas seseorang didasarkan pada indikator tersebut. Dalam kajian ini, fokus analisis adalah religiositas keislaman masyarakat secara umum. Karena itu, pengukuran religiositas menggunakan pendekatan makro yakni jumlah masjid, pesantren, dan jumlah santri. Keberadaan masjid di suatu daerah dijadikan refleksi dari tingkat kehadiran masyarakatnya dalam melaksanakan shalat berjamaah. Pesantren dan jumlah santri merefleksikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan Islam. Karena itu dalam kaitannya dengan penelitian ini, peningkatan jumlah masjid, pesantren dan santri mengindikasikan bahwa religiositas keislaman juga meningkat. Sebaliknya, daerah dengan jumlah masjid, pesantren dan santri relatif sedikit dianggap memiliki tingkat religiositas keislaman yang lebih rendah dibandingkan daerah dengan jumlah masjid, pesantren dan santri relatif lebih banyak. Dengan kata lain, adanya perbedaan jumlah masjid, pesantren dan santri antar daerah mengindikasikan bahwa tingkat religiositas keislaman antar daerah juga berbeda.

Sejumlah literatur menegaskan adanya keterkaitan antara religiositas keagamaan dengan pembangunan ekonomi (Iyer, 2010). Bahkan keberadaan institusi keagamaan dapat dikaitkan dengan pembangunan ekonomi (Rao, 1969). Adanya keterkaitan antara pembangunan ekonomi dengan religiositas keagamaan secara eksplisit dinyatakan oleh Erden (2019) bahwa ajaran agama mempengaruhi budaya dan etika kerja, etika konsumsi dan lain sebagainya, yang pada gilirannya berdampak pada sejumlah variabel makro ekonomi.

Religiositas keislaman berkaitan dengan cara penganutnya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dengan menjadikan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam sebagai pedoman utama. Komitmen dan keyakinan suatu komunitas dalam menjalankan nilai-nilai dan norma-norma keislaman mempengaruhi sikap dan perilaku

mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ajaran agama seperti halnya Islam tidak hanya memberikan pemahaman tentang nilai dan norma yang harus dipatuhi penganutnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi mulai dari produksi, konsumsi hingga distribusi, tetapi juga mempengaruhi sikap mereka dalam memandang keadilan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan (Recio-Roman, Recio-Menéndez, & Román-González, 2019). Dalam masyarakat Muslim, keberadaan masjid misalnya, sangat berperan dalam penyaluran dana zakat kepada masyarakat miskin. Pada akhirnya, ajaran keagamaan berdampak pada pembangunan ekonomi (Clarke, 2016; Aman dkk., 2019).

Keterkaitan Religiositas dan Ketimpangan Pendapatan

Kajian mengenai peran agama dalam mempengaruhi distribusi pendapatan menjadi fokus bagi sejumlah peneliti. Agama memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat dan berimplikasi bagi pembangunan sosial ekonomi (Basedau, Gobien, & Prediger, 2018). Agama memainkan peran penting dalam menjelaskan ketimpangan pendapatan (Naveed & Wang, 2017). Adanya peran agama dalam menjelaskan ketimpangan ekonomi dan sosial juga dikemukakan oleh (McRorie, 2019) bahwa terjadinya ketimpangan ekonomi dan sosial di masyarakat terkait dengan etika sosial yang bersumber dari ajaran agama. Solidaritas kemanusiaan di antara penganut agama berdampak pada ketimpangan pendapatan. Karena itu, dalam pembangunan ekonomi saat ini perlu adanya etika keagamaan untuk memperhatikan isu ketimpangan (Weithman, 2019). Sejumlah ajaran agama memberikan perhatian terhadap isu-isu yang berhubungan dengan distribusi pendapatan di masyarakat. Dalam ajaran Kristen terdapat pandangan bahwa ketimpangan ekonomi merupakan takdir dari Tuhan (Rieger, 2013). Berbeda dengan Katolik yang memandang ketimpangan ekonomi sebagai bagian dan pembelajaran sosial dalam ajaran agama tersebut. Ajaran agama ini menyarankan pentingnya pemerataan pendapatan di masyarakat (Kochuthara, 2017; Himes, 2019).

Meksipun keterkaitan antara agama dan ketimpangan pendapatan telah menjadi fokus

kajian para peneliti sebelumnya, namun belum terdapat kesimpulan yang sama berkaitan dengan arah dan signifikansi hubungan antara dua variabel ini. Dengan kata lain, hingga saat ini belum terdapat kesepakatan akademik mengenai arah dan sifat hubungan antara kedua variabel tersebut. Hubungan antara religiositas dan ketimpangan pendapatan masih sulit untuk dipahami dan masih membingungkan (Keister & Eagle, 2016). Penelitian Elgin dkk. (2013) menggunakan data panel 57 negara menemukan bahwa religiositas meningkatkan ketimpangan pendapatan. Daerah dengan tingkat religiositas tinggi dicirikan dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi. Sebelumnya, kajian yang dilakukan oleh Norris & Inglehart (2004), Palani (2008), dan Rees (2009) juga mengungkapkan bahwa religiositas dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. Terakhir, penelitian empiris yang dilakukan oleh Amalia dkk. (2021) dengan sampel 8.207 rumah tangga dari 141 kabupaten/kota di Indonesia. Menggunakan partisipasi dalam melaksanakan ritual keagamaan sebagai pendekatan dalam mengukur religiositas, temuan mereka mengindikasikan bahwa religiositas memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan multidimensi seperti ketimpangan kesejahteraan material, pendidikan dan kesehatan.

Berbeda dengan sejumlah peneliti di atas, penelitian Naveed & Wang (2017) menggunakan data panel 130 negara menemukan bahwa religiositas keislaman dan Yahudi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan secara umum. Sebaliknya, religiositas kekristenan dan Buddha meningkatkan ketimpangan pendapatan. Bukti empiris lainnya mengenai arah hubungan religiositas dan ketimpangan pendapatan ditemukan oleh Matteo (2015) bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut sangat lemah. Selanjutnya, kajian sejenis yang dilakukan oleh Basedau dkk. (2018) memberikan kesimpulan berbeda dengan sejumlah peneliti di atas. Penelitian mereka menyimpulkan adanya hubungan yang ambivalen antara agama dan ekonomi.

Temuan kontroversial para peneliti seperti dipaparkan di atas hanya menempatkan ketimpangan pendapatan sebagai fungsi dari religiositas. Padahal arah kausalitas antara

religiositas dengan ketimpangan pendapatan dapat terjadi secara berlainan arah. Sejumlah peneliti memberikan bukti empiris bahwa pendapatan dan kesejahteraan sosial juga dapat mempengaruhi religiositas. Seperti halnya hasil kajian Paldam & Gundlach (2013) yang mengungkapkan adanya pengaruh pendapatan terhadap religiositas. Menurut mereka, religiositas menjadi kebutuhan ketika seseorang atau sekelompok masyarakat mengharapkan adanya perlindungan ilahi terhadap risiko kehidupan dan harta benda. Peningkatan pendapatan memungkinkan orang untuk menabung, ikut program asuransi, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mengurangi risiko tersebut. Pada akhirnya, kebutuhan akan perlindungan ilahi turun, dan demikian pula tuntutan kebutuhan terhadap agama. Sebelumnya, kajian Dincer dan Hotard (2011) menggunakan data panel 58 negara menemukan bahwa keragaman dan polarisasi agama berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan. Alasannya adalah bahwa keragaman dan polarisasi agama berpotensi dapat menyebabkan konflik sosial antar penganut agama yang kemudian berdampak pada kegiatan ekonomi. Adanya perbedaan kesempatan berusaha dalam kelompok masyarakat tertentu sebagai akibat konflik sosial berdampak buruk pada pemerataan pendapatan.

Bertolak belakang dengan Dincer dan Hotard, penelitian Storm (2017) menggunakan data survei sosial ekonomi 31 negara Eropa selama periode 2002-2014 mengungkapkan bahwa pendapatan dan kesejahteraan yang lebih rendah berhubungan dengan religiositas yang lebih tinggi. Tingkat kesejahteraan yang rendah membuat masyarakat merasa tidak aman secara material dan spiritual. Di sisi lain ajaran agama mengajarkan pengikutnya untuk sabar dan tabah menghadapi segala kondisi kehidupan. Karena itu, bagi sebagian masyarakat, kembali pada ajaran dan nilai-nilai keagamaan merupakan upaya untuk menemukan ketenangan dan rasa nyaman. Konsisten dengan temuan Storm (2017), sebelumnya kajian yang dilakukan Solt, Habel, & Grant (2011) dalam kasus Amerika juga membuktikan bahwa ketimpangan ekonomi memiliki efek positif yang kuat pada religiositas semua anggota masyarakat tanpa memandang pendapatan. Namun berbeda

dengan penjelasan Storm (2017), dalam kasus Amerika, ketimpangan ekonomi mendorong orang-orang kaya lebih cenderung mengadopsi agama untuk membenarkan hak istimewa mereka, dan memanfaatkan kekayaan mereka untuk menyebarkan keyakinan agama kepada seluruh masyarakat. Penelitian lain oleh Herzer dan Strulik (2016) menemukan bahwa dalam jangka panjang adanya kausalitas dua arah antara religiositas dan pendapatan. Pendapatan yang lebih tinggi mendorong penurunan religiositas, dan penurunan religiositas mendorong pendapatan yang lebih tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan statistik yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik Aceh. Data tersebut mengkombinasikan data *time series* (runut waktu) selama periode tahun 2010-2017 (n = 8) dan data silang (*cross section data*) 23 daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Pemilihan daerah ini didasarkan pada alasan bahwa Aceh merupakan satu-satunya daerah penerapan syariat Islam di Indonesia. Variabel yang dioperasionalkan dan kemudian dianalisis dalam penelitian ini dibatasi hanya pada religiositas keislaman (*Islamic religiosity*) dan ketimpangan pendapatan. Tingkat religiositas suatu daerah dapat menggunakan proksi dari jumlah institusi keagamaan di daerah tersebut (Wang & Lin, 2014). Daerah dengan jumlah institusi keagamaan relatif lebih banyak mengindikasikan bahwa intensitas kegiatan keagamaan di daerah tersebut juga lebih tinggi dan hal ini dapat merefleksikan tingkat religiositas itu sendiri. Dalam kajian ini tingkat religiositas suatu daerah didasarkan pada tiga dimensi yaitu masjid, pesantren dan santri. Dimensi masjid diukur dengan jumlah masjid per 10.000 jiwa penduduk, dimensi pesantren diukur berdasarkan jumlah pesantren per 20.000 jiwa penduduk dan selanjutnya dimensi santri didasarkan jumlah santri per 10.000 jiwa penduduk. Kemudian pengukuran ketimpangan pendapatan menggunakan rasio Gini. Rasio ini merupakan ukuran ketimpangan pendapatan yang paling umum (Gastwirth, 2017). Penggunaan rasio Gini dalam mengukur ketimpangan pendapatan mengacu pada

sejumlah penelitian sebelumnya (Dagum, 2014; Park dkk., 2017; Amri, 2017; Amri & Nazamuddin, 2018; Winkler, 2019; Dutt & Tsetlin, 2020).

Guna menganalisis pengaruh ketiga dimensi religiositas keislaman tersebut terhadap ketimpangan pendapatan, model ekonometrika yang digunakan adalah regresi panel. Penerapan model analisis ini dikarenakan data yang dioperasionalkan dalam kajian ini adalah data panel. Secara ekonometrik, model tersebut seperti ditunjukkan dalam persamaan 1.

$$GR_{it} = \beta_0 + \beta_1 MSJ_{it} + \beta_2 PSTR_{it} + \beta_3 STR_{it} + e_{it} \quad (1)$$

Di mana

- β_0 : Konstanta
- GR_{it} : Gini rasio di daerah *i* pada periode *t*
- MSJ_{it} : Jumlah masjid di daerah *i* pada periode *t*
- $PSTR_{it}$: Jumlah pesantren daerah *i* pada periode *t*
- STR_{it} : Jumlah santri di daerah *i* pada periode *t*
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien estimasi MSJ_{it} , $PSTR_{it}$ dan STR_{it}
- i* : Kabupaten/kota (1, 2, ..., 23)
- t* : Tahun (2010, 2012, ..., 2017)
- e* : *Error term*

Agar koefisien estimasi yang diprediksi melalui regresi panel dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas masing-masing dimensi terhadap ketimpangan pendapatan, seluruh variabel kemudian ditransformasikan dalam bentuk bentuk logaritma. Dengan demikian persamaan 1 dimodifikasi menjadi persamaan 2.

$$\text{Log}GR_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{log}MSJ_{it} + \beta_2 \text{log}PSTR_{it} + \beta_3 \text{log}STR_{it} + e_{it} \quad (2)$$

Di mana

- β_0 : Konstanta
- $\text{log}GR_{it}$: Logaritma Gini rasio daerah ke-*i* pada tahun *t*.
- $\text{log}MSJ_{it}$: Logaritma jumlah masjid daerah ke-*i* pada tahun *t*
- $\text{log}PSTR_{it}$: Logaritma jumlah pesantren daerah ke-*i* pada tahun *t*
- $\text{log}STR_{it}$: Logaritma jumlah santri daerah ke-*i* pada tahun *t*
- β_1, β_2 , dan β_3 : Koefisien regresi $\text{log}MSJ_{it}$, $\text{log}PSTR_{it}$ dan $\text{log}STR_{it}$
- i* : Kabupaten/kota (1, 2, ..., 23)
- t* : Tahun (2010, 2012, ..., 2017)

Penerapan regresi panel dalam mengestimasi hubungan fungsional antar variabel menyediakan tiga alternatif pendekatan, terdiri dari *common-effect*, *fixed-effect* dan *random-effect*. Identifikasi salah satu metode terbaik diantara tiga pendekatan tersebut guna menghasilkan estimasi paling akurat, dapat diketahui melalui *Chow test* dan *Hausman test*. *Chow test* dapat memberikan informasi statistik mengenai salah satu pendekatan terbaik antara *fixed-effect* atau *random-effect*, sedangkan *Hausman test* mendeteksi metode paling akurat antara *random-effect* atau *fixed-effect* (Muliadi & Amri, 2019).

Justifikasi mengenai signifikansi pengaruh salah satu dimensi religiositas keislaman terhadap ketimpangan pendapatan mengacu pada nilai *p-value* yang dihasilkan melalui perhitungan statistik. Jika suatu dimensi memiliki *p-value* < 0,05 mengindikasikan bahwa dimensi ini berpengaruh signifikan. Sebaliknya tidak berpengaruh signifikan jika memiliki *p-value* > 0,05. Selanjutnya, justifikasi mengenai signifikansi pengaruh ketiga dimensi (secara simultan) terhadap ketimpangan, didasarkan pada nilai statistik uji F. Dalam hal ini, nilai *p-value* yang dihasilkan melalui uji statistik tersebut juga dijadikan dasar justifikasi ini, dengan ketentuan jika *p-value* < 0,05 diinterpretasikan bahwa secara bersamaan ketiga dimensi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan. Interpretasi sebaliknya diberikan jika *p-value* > 0,05.

Selanjutnya, guna mendeteksi dan menganalisis arah kausalitas antara dimensi religiositas keislaman dengan ketimpangan pendapatan digunakan *panel Granger causality test*. Model ekonometrik ini merupakan dari uji kausalitas yang sebelumnya diperkenalkan oleh Granger (Lopez & Weber, 2017). *Panel causality test* dapat memberikan informasi statistik tentang apakah kausalitas antara dimensi religiositas dan ketimpangan pendapatan atau antara sesama dimensi merupakan kausalitas satu arah atau kausalitas dua arah. Hubungan antara jumlah masjid (MSJ) dan ketimpangan pendapatan misalnya, merujuk pada Dumitrescu & Hurlin (2012), hubungan kausalitas antara dua variabel ini dapat dinyatakan dalam persamaan 3.

$$\text{LogGR}_{i,t} = \alpha_i + \sum_{k=1}^K \gamma_{ik} \text{LogGR}_{i,t-k} + \sum_{k=1}^K \beta_{ik} \text{LogMSJ}_{i,t-k} + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

dimana $i = 1, \dots, 0$, dan $t = 1, \dots, t$,

$\text{LogGR}_{i,t}$ dan $\text{LogMSJ}_{i,t}$ masing-masing adalah logartima gini rasio dan logaritma jumlah masjid di kabupaten/kota i pada periode t , k adalah *lag order* (durasi waktu), merepresentasikan horizon waktu yang dibutuhkan bagi nilai masa lalu suatu variabel (eksogen) dalam mempengaruhi variabel (endogen) lainnya, dan *lag order* ini diasumsikan identik untuk setiap data. Justifikasi adanya kausalitas antar variabel didasarkan pada nilai *p-value* yang dihasilkan melalui proses perhitungan statistik, dengan ketentuan jika *p-value* < 0,05 berarti terdapat kausalitas. Sebaliknya, jika *p-value* > 0,05 berarti tidak terdapat kausalitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif dan Matriks Korelasi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, variabel dalam penelitian ini terdiri dari ketimpangan pendapatan dan tingkat religiositas keislaman yang pengukurannya menggunakan proksi dengan jumlah masjid, pesantren dan santri. Ketimpangan pendapatan diukur menggunakan rasio Gini. Daerah dengan rasio Gini relatif tinggi mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di daerah tersebut juga tinggi. Demikian pula sebaliknya, daerah dengan rasio Gini relatif rendah mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di daerah tersebut lebih baik, dibandingkan daerah dengan rasio Gini lebih tinggi. Dalam hal religiositas keislaman, daerah dengan jumlah mesjid, pesantren daan jumlah santri relatif lebih banyak dianggap memiliki religiositas keislaman lebih baik dibanding daerah dengan jumlah mesjid, pesantren dan santri relatif sedikit, dan demikian pula sebaliknya.

Penelitian menemukan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di masing-masing daerah di Aceh juga berbeda. Perbedaan tersebut ditunjukkan oleh rasio Gini masing-masing kabupaten/kota. Menggunakan data panel selama periode 2010-2017, daerah dengan ketimpangan paling tinggi ditunjukkan dengan rasio Gini maksimum sebesar 0,454. Sebaliknya daerah dengan ketimpangan paling rendah memiliki gini rasio sebesar 0,186. Secara rata-rata gini rasio

seluruh kabupaten/kota dalam periode waktu tersebut sebesar 0,279.

Selanjutnya, hasil dokumentasi terhadap data yang berkaitan dengan tiga dimensi religiositas keislaman mengindikasikan bahwa tingkat religiositas masyarakat di Aceh relatif berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Secara kuantitatif perbedaan tersebut direfleksikan dengan jumlah masjid, pesantren dan jumlah santri di masing-masing daerah. Di satu sisi terdapat daerah dengan jumlah masjid, pesantren dan santri relatif lebih banyak, dan di sisi lain juga terdapat kabupaten/kota dengan masjid dan pesantren relatif sedikit. Menggunakan data panel selama periode 2010-2017, hasil statistik deskriptif menunjukkan rata-rata jumlah masjid sebanyak 10 unit per 10.000 penduduk, pesantren 5 unit per 20.000 penduduk, dan jumlah santri 298 orang per 10.000 penduduk.

Informasi statistik berkaitan dengan ketimpangan pendapatan dan tiga dimensi religiositas keislaman di Aceh seperti dijelaskan di atas, dapat dilihat dari hasil statistik deskriptif dan matriks korelasi seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1 juga memperlihatkan matriks korelasi antara masing-masing dimensi religiositas keislaman dengan ketimpangan pendapatan. Secara umum terdapat korelasi yang lemah antara ketiga dimensi religiositas tersebut dengan ketimpangan pendapatan.

Pemilihan Pendekatan Regresi Panel

Hasil pengujian regresi panel (Tabel 2), memperlihatkan hasil *Chow test* dan *Haussman test*. *Chow test* menunjukkan nilai *cross section F* sebesar 7,900 dengan *p-value* sebesar 0,000 ($< 0,05$), yang berarti bahwa berdasarkan tes ini, model terbaik adalah *fixed-effect*. Selanjutnya, hasil *Haussman test* menghasilkan nilai X^2 sebesar 15,354 dan nilai *p-value* sebesar 0,000 ($< 0,05$). Uji ini juga memperkuat justifikasi statistik bahwa pendekatan *fixed-effect* memberikan hasil estimasi lebih akurat dibandingkan *random-effect*. Karena itu, regresi panel dengan pendekatan *fixed-effect* diyakini lebih tepat digunakan untuk memprediksi pengaruh dimensi religiositas keislaman terhadap ketimpangan pendapatan.

Secara konseptual, pendekatan estimasi yang paling baik adalah pendekatan yang dapat memberikan hasil paling akurat. Karena itu, akurasi dan ketepatan estimasi dapat didasarkan pada perbandingan data aktual (data observasi) dengan data yang diprediksi. Selisih dua data ini sering juga disebut dengan *residual*. Karena itu, estimasi terbaik adalah estimasi yang memiliki *residual* paling kecil. Menggunakan software *E-views* sebagai alat bantu pengolahan data, titik-titik data observasi dan data yang diprediksi, serta *residual* antara kedua data tersebut secara otomatis ditampilkan dalam bentuk garis (*line*). Grafik *residual*, *actual* dan *fitted line* hasil estimasi regresi panel berkaitan

Tabel 1. Statistik Deskriptif dan Korelasi

Parameter Statistik	Statistik Deskriptif			
	Rasio Gini	Jumlah Masjid per 10.000 pddk	Jumlah Pesantren per 20.000 pddk	Jumlah santri per 10.000 pddk
Mean	0,279	10	5	298
Median	0,281	11	5	286
Maximum	0,454	21	13	849
Minimum	0,186	3	1	17
Observations	184	184	184	184
Koefisien Korelasi				
Gini rasio	1			
Masjid	-0,029	1		
Pesantren	-0,237	-0,169	1	
Santri	-0,125	-0,167	0,551	1

Sumber: Data Sekunder (Diolah), 2021.

Apakah religiositas keislaman memengaruhi ketimpangan pendapatan? Bukti data panel dari Provinsi Aceh

dengan pengaruh religiositas keislaman terhadap ketimpangan pendapatan berdasarkan masing-masing pendekatan (*common-effect*, *fixed-effect* dan *random-effect*) seperti dalam Gambar 2.

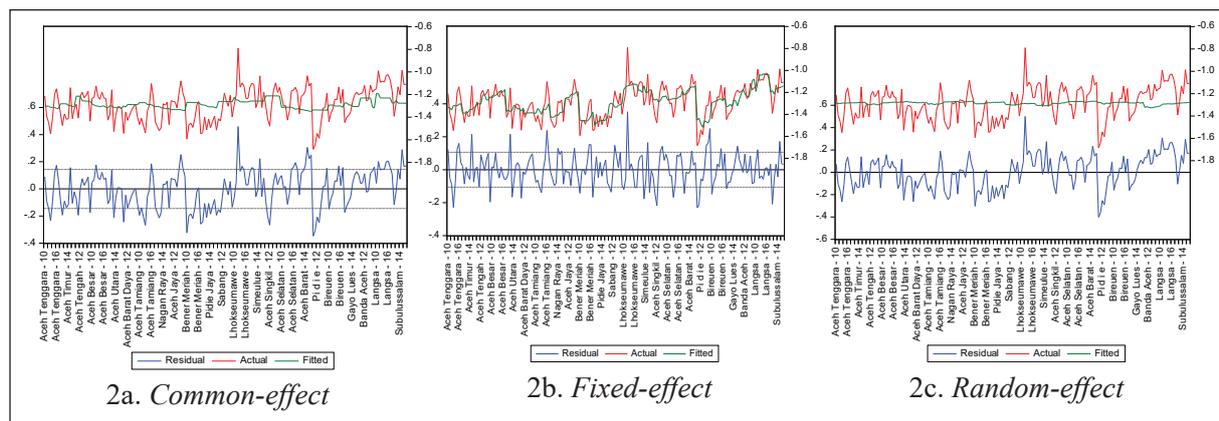
Berdasarkan Gambar 2, dapat dilihat bahwa di antara ketiga grafik tersebut, residual estimasi paling kecil ditunjukkan oleh pendekatan *fixed-effect* (2b). Pada grafik tersebut terlihat bahwa fluktuasi *fitted line* (hasil estimasi), lebih mendekati data yang sebenarnya (*actual line*). Dengan demikian, analisis terhadap grafik tersebut memberikan kesimpulan yang sama dengan *Chow test* dan *Haussman test* sebelumnya, yang mana pendekatan *fixed-effect* merupakan pendekatan terbaik dibandingkan dua pendekatan lainnya.

Justifikasi mengenai akurasi regresi panel dalam memprediksi ketimpangan pendapatan dengan menempatkan dimensi religiositas keislaman sebagai *predictor variables* perlu memperhatikan terpenuhinya asumsi normalitas residual dan tidak adanya gejala multikolinieritas. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, istilah

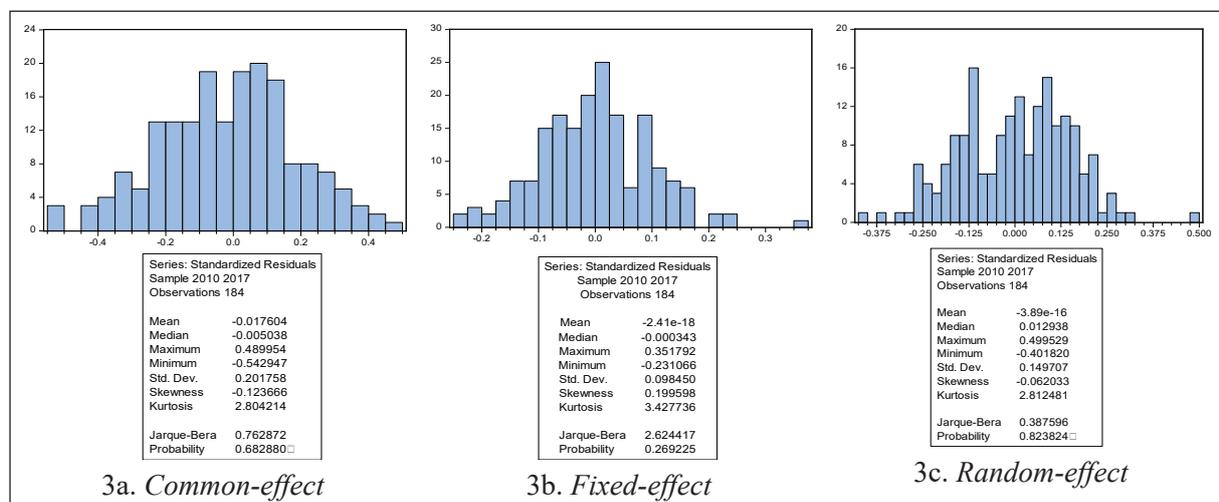
residual merujuk pada selisih nilai aktual variabel endogen dengan nilai prediksinya. Model regresi dikatakan akurat jika *residual* dimaksud terdistribusi secara normal. Uji normalitas *residual* dapat didasarkan pada pendekatan grafik dan nilai *Jarque-Berra (JB) test*. Hasil uji ini seperti terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3 memperlihatkan nilai *J-B test* untuk metode *fixed-effect* menunjukkan angka sebesar 2,624 dengan prob sebesar 0,269 ($> 0,05$) dapat diartikan bahwa residual estimasi terdistribusi secara normal.

Selanjutnya deteksi terhadap gejala multikolinieritas dalam model regresi panel didasarkan pada perbandingan nilai *Adjusted R²* yang diperoleh melalui proses regresi, dengan nilai koefisien korelasi (*r*) antara sesama *predictor variables*. *Predictor variables* dalam kajian ini adalah tiga dimensi religiositas keislaman (jumlah masjid, pesantren dan jumlah santri). Koefisien korelasi antar variabel seperti ditunjukkan dalam Tabel 1. Koefisien korelasi (*r*) antara masjid



Gambar 2. Grafik Residual, Actual, dan Fitted Line



Sumber: Output Eviews, 2021

Gambar 3. Histogram-normality Test

dan pesantren sebesar -0,169, antara masjid dan santri sebesar -0,167, dan terakhir nilai koefisien korelasi antara santri dan pesantren sebesar 0,501. Angka ini lebih kecil dari nilai *Adjusted-R²* pada regresi panel metode *fixed-effect* sebesar 0.553 (Tabel 2). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan *fixed-effect* dalam regresi panel yang digunakan untuk mengestimasi pengaruh tiga dimensi religiositas keislaman tersebut terhadap ketimpangan pendapatan, terbebas dari gejala multikolinieritas.

Analisis Pengaruh Religiositas Keislaman terhadap Ketimpangan Pendapatan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pengukuran religiositas keislaman menggunakan tiga pendekatan terdiri dari jumlah masjid, pesantren dan jumlah santri. Daerah dengan kuantitas

masjid dan pesantren lebih banyak dianggap memiliki religiositas keislaman lebih baik dibandingkan dengan daerah dengan masjid dan pesantren lebih sedikit. Demikian pula halnya daerah dengan jumlah santri lebih banyak juga dianggap lebih religius dibandingkan daerah dengan santri lebih sedikit. Hasil pengolahan data menggunakan regresi panel metode *fixed effect* menginformasikan bahwa ketiga dimensi religiositas keislaman tersebut berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Aceh. Secara statistik, indikasi tersebut ditunjukkan oleh koefisien estimasi masing-masing dimensi seperti dalam Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2, model statistik yang merepresentasikan prediksi religiositas keislaman terhadap ketimpangan pendapatan seperti dalam persamaan 4.

$$\log GR_{it} = -1,865 + 0,022 \log MSJ_{it} + 0,085 \log PSTR_{it} + 0,076 \log STR_{it} \quad (4)$$

Tabel 2. Hasil Regresi Panel

<i>Endogenous variable: logGR</i>									
<i>effect specification of panel regression</i>									
	<i>Common Effect</i>			<i>Fixed Effect</i>			<i>Random Effect</i>		
	Koefisien estimasi	T stat	p-value	Koefisien estimasi	T stat	p-value	Koefisien estimasi	T stat	p-value
C	-1,167	-13,518	0,000	-1,865	-5,568	0,000	-1,377	-9,157	0,000
logMSJ	-0,018	-0,966	0,335	0,022	0,145	0,885	0,008	0,215	0,830
logPSTR	-0,057	-2,877	0,005	0,085	2,004	0,047	0,003	0,107	0,915
logSTR	0,001	0,013	0,989	0,076	2,019	0,045	0,013	0,536	0,593
R ²	0,061			0,553			0,002		
Adjusted R ²	0,046			0,482			-0,014		
F-stat	3,916			7,818			0,138		
Prob(F-stat)	0,009			0,000			0,937		
DW-stat	0,716			1,572			1,241		
				Chow-test		Hausman Test			
				Effects Test	Stat	p-value	Test Summary	X ² Stat	p-value
				Cross-section F	7,900	0,001	Cross-section random	15,354	0,001
				Cross-section X ²	136,516	0,001			
Residual Cross-Section Dependence Test									
				Breusch-Pagan LM	350,204	0,000	Breusch-Pagan LM	397,147	0,000
				Pesaran scaled LM	4,321	0,000	Pesaran scaled LM	6,408	0,000
				Bias-corrected scaled LM	2,678	0,007	Pesaran CD	12,394	0,000
				Pesaran CD	8,408	0,000			

Sumber: Data Sekunder (Diolah), 2021.

Angka di dalam tanda () adalah nilai standar error; p-value < 0,05 mengindikasikan signifikan pada keyakinan 95%

Religiositas keislaman dimensi masjid berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, dengan koefisien estimasi sebesar 0,022. Namun demikian, pengaruh tersebut tidak signifikan dengan $p\text{-value} = 0,885 (> 0,05)$. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan masjid sebagai rumah ibadah bagi umat Islam di Aceh tidak secara nyata berdampak pada peningkatan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Karena masjid merupakan rumah ibadah muslim, maka keberadaannya merefleksikan intensitas partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban ibadah sholat. Daerah dengan jumlah masjid relatif lebih banyak mengindikasikan bahwa intensitas masyarakat dalam menjalankan kewajiban sholat berjamaah di daerah tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan daerah dengan masjid relatif sedikit. Dalam konteks Aceh, eksistensi dan pemanfaatan rumah ibadah tersebut lebih cenderung diorientasikan pada pelaksanaan kegiatan ritual keagamaan seperti sholat berjamaah dan tempat mendalami ilmu agama. Karena itu, dampak utama keberadaan masjid dan aktivitas masyarakat yang terkait dengan rumah ibadah ini lebih berorientasi pada peningkatan iman dan ketauhidan (*ukhrawi oriented*), sehingga tidak memiliki dampak signifikan pada perubahan sikap dan perilaku mereka terkait dengan aktivitas ekonomi. Temuan ini mendukung hasil kajian Darodjat dan Wahyudiana (2014) yang menyimpulkan bahwa dalam praktiknya, pemanfaatan masjid bagi masyarakat muslim hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah shalat dan mempelajari sebagian ilmu agama. Namun, meskipun tidak signifikan, adanya pengaruh positif masjid terhadap ketimpangan pendapatan seperti di atas mengkonfirmasi temuan Gaskins, Golder, dan Siegel (2013) yang menyimpulkan bahwa partisipasi agama menurun seiring dengan perkembangan masyarakat, kemampuan individu menghasilkan barang-barang sekuler dan peraturan negara tentang agama, tetapi partisipasi tersebut meningkat dengan meningkatnya ketimpangan. Sehingga terdapat hubungan positif antara partisipasi keagamaan dengan ketimpangan pendapatan.

Religiositas keislaman dimensi pesantren berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien

estimasi sebesar 0,086. Pengaruh positif ini dinilai signifikan pada keyakinan 95%. Hal ini secara statistik ditunjukkan oleh nilai $p\text{-value} = 0,047 (< 0,05)$. Peningkatan jumlah pesantren di suatu daerah secara nyata berdampak terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Dengan kata lain, semakin banyak jumlah pesantren, semakin tinggi ketimpangan pendapatan. Religiositas keislaman dimensi santri juga berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien estimasi sebesar 0,076. Pengaruh positif tersebut dinilai signifikan pada keyakinan 95%, ditunjukkan oleh $p\text{-value} = 0,045 (< 0,05)$. Daerah dengan jumlah santri lebih banyak mengalami ketimpangan yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah dengan santri lebih sedikit. Dengan kata lain, peningkatan jumlah santri di suatu daerah secara nyata berdampak terhadap peningkatan kesenjangan kaya dan miskin di masyarakat.

Adanya pengaruh religiositas keislaman dimensi pesantren dan santri terhadap ketimpangan pendapatan mengindikasikan keberadaan pesantren di suatu daerah berdampak pada ketimpangan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di daerah yang bersangkutan. Sebagian besar pesantren di Aceh adalah pesantren tradisional dengan kurikulum (*manhaj*) lebih fokus pada kajian kitab kuning (*kutub turats muktabarrah*). Pada tahun 2017 jumlahnya mencapai 77,7% dari total pesantren di daerah ini. Sistem pendidikan mereka hanya berorientasi pada pendalaman ilmu agama Islam tanpa memasukkan kurikulum pendidikan umum seperti halnya sekolah atau madrasah, apalagi materi pembelajaran yang terkait dengan "*livelihood skill/education*". Akibatnya, meskipun keberadaan pesantren tradisional mampu menciptakan calon dai/penceramah (yang dalam konteks Aceh disebut dengan Tengku), tetapi belum mampu memberikan jawaban bagi tuntutan perbaikan kehidupan masyarakat secara ekonomi. Lulusan pesantren ini pada umumnya memiliki kualifikasi sebagai imam masjid, khatib, guru agama, dan penceramah. Kalau ada sebagian di antara mereka dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja, kemampuan dan keterampilan kerja yang mereka miliki bukanlah berasal dari pendidikan dayah. Di sisi lain para lulusan sekolah formal tidak hanya

memiliki kemampuan dan keterampilan lebih baik, tetapi juga lebih siap untuk memasuki dunia kerja. Mereka yang masuk dalam kelompok ini memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Secara keseluruhan ketiga dimensi religiositas keislaman (masjid, pesantren dan santri) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Semakin tinggi religiositas terutama untuk dimensi pesantren dan santri, semakin tinggi ketimpangan pendapatan. Adanya pengaruh positif dimensi religiositas keislaman terhadap ketimpangan pendapatan sejalan temuan Rupasingha dan Chilton (2009) menggunakan data tingkat kawasan di Amerika Serikat tentang kepatuhan bergama, yang menemukan adanya pengaruh negatif kepatuhan pada nilai-nilai religiositas terhadap kinerja perekonomian. Dampaknya menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Hasil kajian ini juga mengkonfirmasi temuan penelitian Dincer dan Hotard (2011) menggunakan panel 58 negara, yang memberikan bukti empiris adanya hubungan positif antara religiositas keagamaan dan ketimpangan pendapatan. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Amalia dkk. (2021) menggunakan sampel 8.207 rumah tangga dari 141 kabupaten/kota di Indonesia yang menyimpulkan bahwa religiositas memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan multidimensi seperti termasuk ketimpangan pendapatan.

Guna menganalisis arah kausalitas antara ketiga dimensi religiositas keislaman dengan ketimpangan pendapatan digunakan panel *Granger causality test*. Hasil test tersebut memperlihatkan bahwa pada lag 1 terdapat kausalitas satu arah (*unidirectional causality*) dari ketimpangan pendapatan ke pesantren. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan jumlah pesantren merupakan respon terhadap perubahan ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, perubahan distribusi pendapatan pada periode tertentu (t) menyebabkan perubahan religiositas keislaman (dimensi pesantren) pada periode berikutnya ($t+1$). Adanya kausalitas dari ketimpangan pendapatan ke religiositas keislaman (dimensi pesantren) mengkonfirmasi hasil kajian McCleary dan Barro (2006) yang membuktikan

bahwa pendapatan mendorong perubahan dalam partisipasi dan keyakinan keagamaan.

Keberadaan pesantren merefleksikan partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan ibadah dan menekuni ilmu keislaman. Karena keberadaan pesantren dalam suatu kawasan di Aceh, juga disertai dengan masjid sebagai tempat ibadah. Lembaga pendidikan Islam tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para santri dalam menekuni pendidikan agama Islam, tetapi juga sebagai tempat bagi masyarakat sekitar dalam menunaikan kewajiban shalat dan kegiatan keagamaan lainnya. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Solt, Habel, dan Grant (2011) dalam kasus Amerika Serikat yang menyimpulkan bahwa ketimpangan yang tinggi mendorong peningkatan religiositas. Hasil penelitian Storm (2017) menggunakan data survei sosial di 30 negara Eropa juga membuktikan bahwa adanya kausalitas dari ketimpangan pendapatan ke religiositas keagamaan. Pendapatan dan kesejahteraan yang lebih rendah, mendorong peningkatan religiositas keagamaan. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil Granger causality test dapat dilihat Tabel 3.

Mengacu pada hasil statistik dalam Tabel 3, maka arah kausalitas antara ketimpangan pendapatan dan tiga dimensi religiositas keislaman seperti dalam Gambar 3. Pada lag 1, kausalitas satu arah juga terjadi dari masjid ke pesantren. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan praktik ibadah sejalan dengan kesadaran tentang pentingnya pendidikan keagamaan terutama melalui pesantren. Masjid merupakan tempat ibadah bagi masyarakat muslim. Peningkatan kuantitas rumah ibadah tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran mereka dalam menjalankan ibadah shalat dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bernuansa keislaman. Dalam konteks ini, intensitas praktik ibadah dan kegiatan keagamaan mendorong munculnya kebutuhan masyarakat akan tokoh/pimpinan yang dapat mereka jadikan rujukan dan pedoman baik dalam kegiatan beribadah maupun acara keagamaan lainnya. Di sisi lain, pesantren sebagai lembaga pendidikan non formal memiliki peran penting dalam melahirkan guru agama, imam, dai dan penceramah. Sehingga mendorong kesadaran

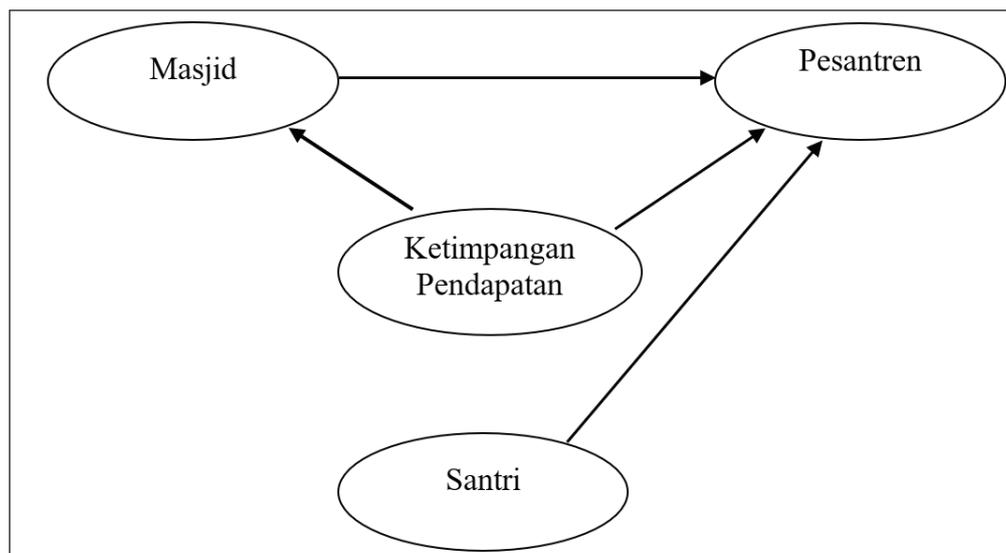
Tabel 3. Hasil Granger Causality Test

Variabel Endogen	Variabel Eksogen							
	Lag 1				Lag 2			
	logGR	logMSJ	logPSTR	logSTR	logGR	logMSJ	logPSTR	logSTR
logGR	-	[0,779] (0,378)	[1,534] (0,217)	[0,481] (0,489)	-	[0,049] (0,952)	[0,884] (0,416)	[0,052] (0,949)
logMSJ	[1,999] (0,159)	-	[0,103] (0,749)	[0,502] (0,479)	[3,986]** (0,021)	-	[1,759] (0,176)	[0,539] (0,585)
logPSTR	[2,935]* (0,089)	[3,345]* (0,069)	-	[0,001] (0,986)	[4,159]** (0,018)	[1,391] (0,252)	-	[2,649]* (0,074)
logSTR	[0,024] (0,877)	[0,112] (0,738)	[0,303] (0,583)	-	[0,836] (0,436)	[0,793] (0,455)	[0,059] (0,943)	-
	Lag 3				Lag 4			
	logGR	logMSJ	logPSTR	logSTR	logGR	logMSJ	logPSTR	logSTR
logGR	-	[0,711] (0,548)	[1,008] (0,392)	[0,584] (0,627)	-	[1,822] (0,132)	[0,329] (0,858)	[1,756] (0,146)
logMSJ	[1,755] (0,160)	-	[1,269] (0,289)	[0,314] (0,815)	[1,263] (0,291)	-	[1,106] (0,359)	[1,237] (0,302)
logPSTR	[1,886] (0,136)	[0,439] (0,725)	-	[2,088] (0,106)	[0,979] (0,423)	[0,285] (0,887)	-	[2,668]** (0,038)
logSTR	[0,547] (0,651)	[0,675] (0,569)	[0,216] (0,885)	-	[0,796] (0,531)	[0,526] (0,717)	[0,935] (0,448)	-

Angka dalam [] adalah nilai F statistik, dan () adalah nilai p-value.

*) signifikan pada keyakinan 90%, dan **) signifikan pada keyakinan 95%.

Sumber: Data Sekunder (Diolah), 2021.



Gambar 4. Arah Kausalitas Antarvariabel

masyarakat untuk membangun pesantren. Jadi, perkembangan pesantren merupakan respon terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lulusan lembaga pendidikan ini. Hal inilah yang menyebabkan adanya kausalitas dari masjid ke pesantren.

Pada lag 2 terdapat kausalitas satu arah dari ketimpangan pendapatan ke jumlah masjid dan pesantren. Dalam konteks Aceh, adanya kausalitas dari ketimpangan pendapatan ke

dua dimensi religiositas keislaman tersebut dapat dijelaskan dengan dua alasan. Pertama, memburuknya tingkat kesejahteraan masyarakat kelompok miskin, dan kedua, meningkatnya proporsi pendapatan yang diterima oleh sebagian kelompok masyarakat. Akibatnya, semakin besar kesenjangan (*gap*) antara masyarakat yang memiliki pendapatan relatif besar di satu sisi, dengan mereka yang memiliki pendapatan rendah (kelompok miskin) di sisi lain. Bagi

kelompok miskin, kondisi ketimpangan tersebut menyebabkan sebagian di antara mereka merasa tidak aman baik secara material maupun spiritual. Kondisi tersebut mendorong mereka kembali pada ajaran dan nilai-nilai religiusitas keagamaan guna memperoleh ketenangan dan rasa nyaman. Apalagi ajaran Islam mengajarkan pentingnya kesabaran dan rasa syukur atas rahmat yang diberikan Allah, meskipun berada dalam kondisi miskin.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Norris dan Inglehart (2004) dan Rees (2009) yang menyimpulkan bahwa dalam masyarakat dengan ketimpangan ekonomi yang tinggi, sebagian kelompok masyarakat merasa tidak aman baik secara material maupun spiritual, dan kondisi tersebut mendorong mereka untuk kembali pada ajaran dan nilai-nilai keagamaan dengan tujuan dapat menemukan ketenangan dan rasa nyaman. Keberadaan masjid sebagai tempat ibadah mampu memberikan rasa nyaman bagi masyarakat muslim. Demikian pula halnya pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, yang sekaligus dijadikan masyarakat sebagai tempat menerima nasehat-nasehat keagamaan dan mengajarkan mereka tentang kesabaran dan pentingnya mensyukuri kondisi yang mereka alami dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, meningkatnya ketimpangan menjadi salah satu indikator penting bahwa jumlah penduduk miskin juga meningkat. Bagi mereka yang termasuk dalam kelompok ini, pesantren tradisional menjadi alternatif pilihan terbaik dalam melanjutkan pendidikan anak.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sebagian besar pesantren di Aceh adalah pesantren tradisional (*dayah salafiyah*) dengan *manhaj* pendidikannya fokus pada kajian kitab kuning (*kutubut turats muktabarrah*) berbahasa Arab. Hingga tahun 2017 pesantren ini mencapai 77,7% dari total pesantren yang ada di Aceh (BPS Aceh, 2018). Keberadaan pesantren ini di suatu daerah tidak terlepas dari kesadaran tokoh agama/tengku dan masyarakat daerah yang bersangkutan akan pentingnya pendidikan Islam. Karena itu, sejak awal pendiriannya, biaya pengelolaan lembaga pendidikan non formal ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat setempat. Kurikulum pendidikan yang hanya menfokuskan diri

pada kajian kitab kuning, pesantren ini tidak memerlukan fasilitas pendidikan seperti halnya sekolah umum dan pesantren modern. Bahkan kegiatan belajar mengajar antara guru agama/tengku dan santri sebagai peserta didik dapat berlangsung dengan baik di masjid/mushallah yang keberadaannya merupakan bagian dari lembaga pesantren itu sendiri. Sehingga biaya pendidikan yang dibebankan kepada santri jauh lebih murah dibandingkan biaya pendidikan pada pesantren modern. Karena itu, bagi masyarakat yang tergolong kelompok miskin, pesantren tradisional menjadi alternatif pilihan terbaik bagi pendidikan anak, sehingga permintaan terhadap lembaga pendidikan tersebut meningkat seiring dengan meningkatnya kemiskinan. Hal inilah yang menyebabkan adanya kausalitas dari ketimpangan pendapatan ke pesantren.

Adanya kausalitas satu arah dari ketimpangan pendapatan ke perkembangan jumlah masjid dan pesantren juga dapat dimaknai bahwa terjadinya perubahan distribusi pendapatan di masyarakat menyebabkan perubahan religiusitas keislaman. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Müller, De Graaf, dan Schmidt (2014) membuktikan bahwa ketimpangan menjadi mendorong perubahan religiusitas. Tetapi bertolak belakang dengan hasil penelitian Becker dan Woessmann (2013) di Prusia dan hasil kajian Franck dan Iannaccone (2014) menggunakan data panel 10 negara Industri di Eropa tentang religiusitas kekristenan, yang mengungkapkan tidak ada kausalitas antara pendapatan dan religiusitas keagamaan tersebut.

Berdasarkan Gambar 3 juga terlihat bahwa pada lag 2 dan lag 3 terjadi kausalitas satu arah dari santri ke pesantren. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadinya perubahan jumlah pesantren sebagai lembaga pendidikan non formal Islam di Aceh merupakan respon terhadap perubahan jumlah santri. Ketika jumlah santri meningkat, maka kondisi tersebut direspon secara positif oleh masyarakat dengan mendirikan pesantren. Apalagi sebagai daerah yang mengimplementasikan syariat Islam, kesadaran tentang pentingnya pendidikan keislaman mendorong masyarakat di daerah ini untuk mendirikan pesantren. Bahkan di hampir seluruh daerah kabupaten/kota di Aceh, para orang tua merasa bahwa pendidikan

formal saja tidak cukup bagi anak mereka, sehingga selain bersekolah pada pendidikan formal, seseorang anak usia sekolah di Aceh juga mengenyam pendidikan agama melalui pesantren.

Hasil *Granger causality test* di atas menginformasikan bahwa tidak terdapat kausalitas dari tiga dimensi religiositas keislaman ke ketimpangan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek (horizon waktu 1-4 periode), terjadinya perubahan dalam religiositas keislaman tidak mendorong perubahan dalam ketimpangan pendapatan masyarakat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Lipford dan Tollison (2003) menggunakan panel di Amerika Serikat yang menemukan adanya kausalitas dua arah (*bidirectional causality*) antara pendapatan dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan, dan temuan Herzer dan Strulik (2016) menggunakan data panel lintas negara yang menyimpulkan adanya kausalitas dua arah antara religiositas dan pemerataan pendapatan di masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Seiring dengan pembangunan ekonomi daerah, kabupaten/kota di Aceh juga dihadapkan pada persoalan distribusi pendapatan di masyarakat. Sejumlah daerah memiliki ketimpangan pendapatan relatif tinggi ditunjukkan oleh gini rasio daerah yang bersangkutan. Padahal, Aceh dikenal sebagai daerah penerapan syariat Islam di Indonesia yang dalam segala dimensi kehidupan masyarakatnya mengedepankan nilai-nilai dan norma-norma religiositas keislaman. Penelitian ini menguji keterkaitan antara religiositas keislaman tersebut dengan ketimpangan pendapatan di Aceh. Pengukuran religiositas keislaman diukur menggunakan tiga dimensi yakni keberadaan masjid sebagai tempat ibadah, pesantren dan santri merefleksikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan Islam.

Menggunakan *panel data set of 23* kabupaten/kota yang kemudian dilanjutkan dengan penggunaan regresi panel metode *fixed effect* sebagai alat analisis data, penelitian ini mengungkapkan bahwa pesantren dan santri berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sebaliknya

religiositas keislaman dimensi masjid tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Kausalitas satu arah terjadi dari ketimpangan pendapatan ke masjid dan pesantren, dan dari masjid dan santri ke pesantren. Sebaliknya tidak terdapat kausalitas dari ketiga dimensi religiositas tersebut ke ketimpangan pendapatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam jangka pendek, perubahan religiositas keislaman di Aceh merupakan respon terhadap perubahan ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, ketimpangan pendapatan tidak respon terhadap perubahan religiositas keislaman.

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, penelitian ini berimplikasi bahwa kebijakan pemerintah yang berdampak pada religiositas keislaman dengan menempatkan jumlah masjid, pesantren dan santri sebagai tolok ukurnya, dapat menerangkan variasi ketimpangan pendapatan di masyarakat. Sehingga keberadaan tiga dimensi religiositas ini tidak hanya memberikan gambaran tentang internalisasi nilai-nilai keislaman di masyarakat, tetapi juga berpotensi untuk dijadikan instrumen penting dan infrastruktur kelembagaan guna mendukung kebijakan pembangunan ekonomi dan meningkatkan pemerataan pendapatan di masyarakat. Akhirnya, secara operasional, upaya penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat kabupaten/kota di Aceh melalui intervensi kebijakan yang berhubungan dengan religiositas keislaman dapat mempertimbangkan hal-hal berikut.

Pertama, memasukkan kurikulum *life skill* dalam pendidikan pesantren sehingga institusi ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan non formal yang berorientasi pada peningkatan akhlak dan pendalaman ilmu pengetahuan agama Islam bagi santri. Tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi perbaikan kehidupan masyarakat. Dengan demikian perkembangan lembaga pendidikan ini di suatu daerah juga seiring dengan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di daerah yang bersangkutan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan dan menurunkan tingkat ketimpangan.

Kedua, memperkuat keberadaan institusi masjid dari dimensi religiositas dan dimensi duniawi. Karena selama ini keberadaan masjid

dalam suatu daerah hanya dimanfaatkan sebagai tempat ibadah tanpa memberikan kontribusi yang nyata bagi kegiatan ekonomi produktif. Adanya organisasi kemasyarakatan yang selama ini didasarkan pada kepentingan religiositas seperti kelompok pengajian misalnya dapat diarahkan pada munculnya kegiatan ekonomi produktif di masyarakat tanpa mengurangi kepentingan mereka dalam mendalami nilai-nilai religiositas keislaman. Dengan demikian, peningkatan pendidikan non formal islam seiring dengan perbaikan taraf hidup masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Pengukuran religiositas keislaman menggunakan pendekatan data makro dengan menjadikan jumlah masjid, pesantren dan jumlah santri sebagai pendekatan dari tingkat religiositas. Ketiga dimensi tersebut hanya mampu merefleksikan religiositas keislaman dari aspek partisipasi keagamaan terutama dalam bentuk praktek ibadah dan intensitas perilaku masyarakat untuk mendalami ajaran agama Islam. Padahal religiositas keislaman tidak hanya didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat melaksanakan ibadah sholat dan ketekunan dalam mempelajari nilai dan norma keislaman, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk keyakinan, kepercayaan, serta konsistensi mereka dalam memmanifestasikan nilai-nilai tersebut dalam seluruh aspek kehidupan, perilaku kerja, kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. Karena itu, penelitian yang akan datang disarankan agar dapat mengukur religiositas keislaman dari aspek lain sebagai *predictor variable* bagi ketimpangan pendapatan. Aspek lain dimaksud di antaranya seperti penerimaan zakat per kapita, rasio jumlah jamaah haji terhadap total penduduk, dan pendekatan kuantitatif lainnya yang dapat merefleksikan tingkat religiositas keislaman masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Raiya, H., Pargament, K. I., Mahoney, A., & Stein, C. (2008). A psychological measure of Islamic religiousness: Development and evidence for reliability and validity. *The International Journal for the Psychology of Religion*, 18(4), 291–315. doi:10.1080/10508610802229270.

- Aji, H. M. (2018). The effect of knowledge about halal and Islamic religiosity on attitude toward halal label. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding*. 1, 1–8.
- Amalia, N., Moeis, J. P., Arundina, T., Pertiwi, R. H., & Mardhatillah, A. (2021). Impact analysis of religiosity and altruism on multidimensional inequality. *International Review of Economics and Finance*, 71, 517–525. doi:10.1016/j.iref.2020.09.023
- Aman, J., Abbas, J., Mahmood, S., Nurunnabi, M., & Bano, S. (2019). The influence of Islamic religiosity on the perceived socio-cultural impact of sustainable tourism development in Pakistan: A structural equation modeling approach. *Sustainability*, 11(11), 30–39. doi:10.3390/su11113039.
- Amri, K. (2017). Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan: Panel data 8 provinsi di Sumatera. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 1(1), 1–11. doi: https://doi.org/10.35870/emt.v1i1.22
- Amri, K., & Nazamuddin. (2018). Is there causality relationship between economic growth and income inequality? Panel data evidence from Indonesia. *Eurasian Journal of Economics and Finance*, 6(2), 8–20. DOI:10.15604/ejef.2018.06.02.002
- Basedau, M., Gobien, S., & Prediger, S. (2018). The multidimensional effects of religion on socioeconomic development: A review of the empirical literature. *Journal of Economic Surveys*, 32(4), 1106–1133. doi:10.1111/joes.12250.
- Becker, S. O., & Woessmann, L. (2013). Not the opium of the people: Income and secularization in a panel of Prussian countries. *American Economic Review, Papers and Proceedings*, 103(3), 539–544. DOI: 10.1257/aer.103.3.539.
- BPS Aceh (2018). Provinsi Aceh dalam angka 2018. Retrieved from <https://aceh.bps.go.id/publication/2018>.
- BPS Aceh (2019). Provinsi Aceh dalam angka 2019. Retrieved from <https://aceh.bps.go.id/publication/2019>.
- Cerniauskas, N., & Ciginas, A (2020) Measurement and decomposition of Lithuania's income inequality, *Baltic*

- Journal of Economics*, 20(2), 139–169, doi: 10.1080/1406099X.2020.1780693.
- Clarke, M. (2016). Points of equilibrium: Religious beliefs and economic development policy. *Sustainable Development*, 24(3), 181–189. doi:10.1002/sd.1620.
- Dagum, C. (2014). *Income inequality measures*. Wiley StatsRef: Statistics Reference Online. doi:10.1002/9781118445112.stat03471.
- Darodjat & Wahyudiana. (2014). Memfungsikan masjid sebagai pusat pendidikan untuk membentuk peradaban Islam. *Islamadina*, 9(2), 1–13.
- Dincer, O. C., & Hotard, M. J. (2011). Ethnic and religious diversity and income inequality. *Eastern Economic Journal*, 37(3), 417–430. doi:10.1057/ej.2010.58.
- Dumitrescu, E. I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non causality in heterogeneous panels. *Economic Modelling*, 29, 1450–1460. doi:10.1016/j.econmod.2012.02.
- Dutt, P., & Tsetlin, I. (2020). Income distribution and economic development: Insights from machine learning. *Economics & Politics*, 33(1), 1–36 doi:10.1111/ecpo.12157.
- Elgin, C., Goksel, T., Gurdal, M. Y., & Orman, C. (2013). Religion, income inequality, and the size of the government, *Economic Modelling*, 30, 225–234.
- Erden. (2019). The new religion-based work ethic and cultural consumption patterns of religiously conservative groups in Turkey. *Religions*, 10(10), 541. doi:10.3390/rel10100541.
- Franck, R., & Iannaccone, L. (2014). Religious decline in the 20th century west: Testing alternative explanations. *Public Choice*, 159(3/4), 385–414. doi:10.1007/s11127-013-0103-9
- Gaskins, B., Golder, B., & Siegel, D. A. (2013). Religious participation and economic conservatism, *American Journal of Political Science*, 57(4), 823–840. doi: 10.1111/ajps.12024.
- Gastwirth, J. L. (2017). Is the gini index of inequality overly sensitive to changes in the middle of the income distribution? *Statistics and Public Policy*, 4(1), 1–11. doi:10.1080/2330443x.2017.1360813.
- Herzer, D., & Strulik, H. (2016). Religiosity and income: a panel cointegration and causality analysis. *Applied Economics*, 49(30), 2922–2938. doi:10.1080/00036846.2016.1251562.
- Himes, K. R. (2019). Catholic social teaching, economic inequality, and American society. *Journal of Religious Ethics*, 47(2), 283–310. doi:10.1111/jore.12268.
- Iyer, S. (2010). Religion and economic development. *Economic Growth*, 222–228. doi:10.1057/9780230280823_28
- Jana-Masri, A., & Priester, P. E. (2007). The development and validation of a Qur'an-based instrument to assess Islamic religiosity: The religiosity of Islam scale. *Journal of Muslim Mental Health*, 2(2), 177–188. doi:10.1080/15564900701624436.
- Keister, L. A., & Eagle, D. (2016). Religion and inequality: The role of status attainment and social balance processes, *Social Thought and Research*, 33, 141–171.
- Kochuthara, S. (2017). Economic inequality: An ethical response. *Religions*, 8(8), 141. doi:10.3390/rel8080141.
- Lam, K., & Mansouri, F. (2020). Beyond (mis)-recognition: Muslim youth and religiosity in Australia. *Journal of Youth Studies*, 1–16. doi:10.1080/13676261.2020.1766667.
- Lipford, J. W., & Tollison, R. D. (2003). Religious participation and income. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 51(2), 249–260. doi:10.1016/S0167-2681(02)00096-3.
- Lopez, L., & Weber, S. (2017). Testing for Granger causality in panel data, *The Stata Journal*, 17(4), 927–984. doi:10.1177/1536867x1801700412
- Makros, J., & McCabe, M. (2003). The relationship between religion, spirituality, psychological adjustment, and quality of life among people with multiple sclerosis. *Journal of Religion and Health*, 42(2), 143–159. doi:10.1023/A:1023681830716
- Matteo, L. D. (2015). All equal in the sight of God: Economic inequality and religion in the early twentieth century, *European Review of Economic History*, 20, 23–45.
- McCleary, R. M., & Barro, R. J. (2006). Religion and economy, *Journal of Economic*

- Perspectives*, 20(2), 49–72. DOI: 10.1257/jep.20.2.49.
- McRorie, C. (2019). Heterodox economics, social ethics, and inequalities. *Journal of Religious Ethics*, 47(2), 232–258. doi:10.1111/jore.12263.
- Minarik, P. (2019). Religiosity and economic attitudes in post-communist Central Europe: Some additional evidence. *Social Compass*, 66(1), 1–21, doi:10.1177/0037768619868434.
- Muliadi, & Amri, K. (2019). Infrastruktur jalan, belanja modal dan kesempatan kerja: Bukti data panel kabupaten kota di Aceh, *Jurnal Manajemen dan Sains*, 4(2), 334–341. doi:10.33087/jmas.v4i2.115
- Müller, T. S., De Graaf, N. D., & Schmidt, P. (2014). Which societies provide a strong religious socialization context? Explanations beyond the effects of national religiosity. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 53(4), 739–759. doi:10.1111/jssr.12147.
- Musa, A. (2015). Spiritual beliefs and practices, religiosity, and spiritual well-being among Jordanian Arab muslim university students in Jordan. *Journal of Spirituality in Mental Health*, 17(1), 34–49. doi:10.1080/19349637.2014.957609.
- Naveed, A., & Wang, C. (2017). Can religion explain cross-country differences in inequality? A global perspective. *Social Choice and Welfare*, 50(3), 481–518. doi:10.1007/s00355-017-1093-1.
- Norris, P., & Inglehart, R. (2004). *Sacred and secular: religion and politics worldwide*. Cambridge University Press.
- Palani, P. (2008). The effect of religiosity on income inequality. *Journal of Politics and International Affairs*, 61–70.
- Paldam, M., & Gundlach, E. (2013) The religious transition. A long-run perspective. *Public Choice*, 156, 105–123. https://doi.org/10.1007/s11127-012-9934-z.
- Park, J., Kim, Y., & Heo, S. (2017). Dual-index measurement of income inequality. *Bulletin of Economic Research*, 70(3), 277–284. doi:10.1111/boer.12141.
- Qanun Aceh No. 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
- Rao, M. S. A. (1969). Religion and economic development. *Sociological Bulletin*, 18(1), 1–15. doi:10.1177/0038022919690101.
- Recio-Román, A., Recio-Menéndez, M., & Román-González, M. V. (2019). Religion and innovation in Europe: Implications for product life-cycle management. *Religions*, 10(10), 589. doi:10.3390/rel10100589.
- Rees, T. J. (2009). Is personal insecurity a cause of cross-national differences in the intensity of religious belief? *Journal of Religion and Society*, 11, 1–17.
- Rieger, J. (2013). The ethics of wealth in a world of economic inequality: A Christian perspective in a Buddhist-Christian dialogue. *Buddhist-Christian Studies*, 33, 153–162. http://www.jstor.org/stable/43185116
- Rupasingha, A., & Chilton, B. (2009). Religious adherence and county economic growth in the US. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 72, 438–450. doi:10.1016/j.jebo.2009.05.020.
- Solt, F., Habel, P., & Grant, J. T. (2011). Economic inequality, relative power, and religiosity. *Social Science Quarterly*, 92(2), 447–465. doi:10.1111/j.1540-6237.2011.00777.x.
- Storm, I. (2017). Does economic insecurity predict religiosity? Evidence from the European Social Survey 2002–2014. *Sociology of Religion*, 78(2), 146–172. doi:10.1093/socrel/srw055.
- Van Buren, H. J., Syed, J., & Mir, R. (2019). Religion as a macro social force affecting business: concepts, questions, and future research. *Business & Society*, 58(1), 1–24, doi:10.1177/0007650319845097.
- Wang, Q., & Lin, X. (2014). Does religious beliefs affect economic growth? Evidence from provincial-level panel data in China. *China Economic Review*, 31, 277–287. doi:10.1016/j.chieco.2014.10.00
- Weithman, P. (2019). Religious ethics and economic inequality. *Journal of Religious Ethics*, 47(2), 223–231. doi:10.1111/jore.12265.

Wells, R. (2006). Education's effect on income inequality: An economic globalisation perspective. *Globalisation, Societies and Education*, 4(3), 371–391. doi:10.1080/14767720600955428.

Winkler, H. (2019). The effect of income inequality on political polarization: Evidence from European regions, 2002-2014. *Economics & Politics*, 31(2), 1–26 . doi:10.1111/ecpo.12129.